

**Laporan Hasil Tindak Lanjut Pelaksanaan
Survei Kepuasan Masyarakat
Tahun 2023 Semester 2**



**DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam laporannya, World Bank menjelaskan bahwa pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat dicapai jika ekspektasi dan kebutuhan dari pengguna layanan diakomodir dalam proses penyediaan pelayanan. Hal ini juga sejalan dengan salah satu asas dari penyelenggaraan pelayanan publik yang tertulis dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu asas partisipatif. Asas partisipatif selanjutnya diatur dalam bab khusus Pengikutsertaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai pembina pelayanan publik nasional telah merumuskan berbagai instrumen pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik untuk menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik. Salah satu instrumen tersebut adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan SKM. Pertama, untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan. Kedua, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Terakhir, untuk mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Untuk mencapai berbagai tujuan tersebut, maka Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas perlu menyusun rencana tindak lanjut dan laporan hasil tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar proses *continuous improvement* dalam proses layanan publik dapat dipastikan dan pada akhirnya terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB II
DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas tahun 2023 menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Tahun 2023

No	Unsur	IKM	Mutu Layanan
1	Persyaratan	79,5	Baik
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	79,5	Baik
3	Waktu Penyelesaian	81	Baik
4	Biaya/Tarif	83	Baik
5	Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan	79,5	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	80	Baik
7	Perilaku Pelaksana	81,25	Baik
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	89,5	Sangat Baik
9	Sarana dan Prasarana	76,75	Baik

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Oleh karena itu, perlu disusun sebuah rencana tindak lanjut perbaikan terhadap unsur-unsur dengan nilai rendah. Untuk memastikan rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik, maka perlu disusun skala prioritas perbaikan unsur yang terdiri dari 3 unsur dengan nilai terendah. Kerangka rencana tindak lanjut dari ketiga unsur tersebut, dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM Tahun 2023


No	Prioritas Unsur	Program/ Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	Sarana dan Prasarana	Perbaikan lantai pada gedung UPTD RPH Wangon		✓			Umpeg
		Perbaikan Pintu pada gedung UPTD Puskesmas Banyumas			✓		Umpeg
2	persyaratan	Sosialisasi persyaratan kegiatan vaksin PMK (Penyakit Mulut dan Kuku)	✓				Bidang Kesehatan Hewan
		Sosialisasi persyaratan pemberian subsidi BBM terhadap sektor usaha mikro			✓		Bidang Peternakan
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Sosialisasi prosedur pemasangan eartag pada hewan ternak			✓		Bidang Kesehatan Hewan

BAB III

REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT SKM TAHUN 2023

Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan)	Dokumentasi Kegiatan	Tantangan/Hambatan
1	Perbaikan lantai pada gedung UPTD RPH Wangon	Belum	Tahun 2024 pemeliharaan gedung dilaksanakan di RPH Cilongok dikarenakan persiapan di merger dengan RPH untuk Ajibarang. Untuk perbaikan lantai gedung UPTD RPH Wangon di usulkan di tahun 2025		Karena Keterbatasan Anggaran
	Perbaikan Pintu pada gedung UPTD Puskesmas Banyumas	Belum	Usulan anggaran pada tahun 2025, karena anggaran pemeliharaan gedung kantor tahun 2024 diperuntukkan untuk pembangunan ruangan rapat dan ruangan kerja Kepala Dinas		Karena Keterbatasan Anggaran

<p>2 Sosialisasi persyaratan kegiatan vaksin PMK (Penyakit Mulut dan Kuku)</p>	<p>Sudah</p>	<p>Sosialisasi dilaksanakan pada saat kegiatan vaksin PMK (Penyakit Mulut dan Kuku)</p>		<p>Kurangnya dukungan dari peternak hewan karena takut setelah di vaksin, hewan menjadi sakit dan untuk sapi bunting tidak mau di vaksin karena takut akan keguguran</p>
--------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Sosialisasi persyaratan pemberian subsidi BBM terhadap sektor usaha mikro</p>	<p>Sudah</p>	<p>Via Zoom Meeting</p>	<p>Untuk sub sektor Peternakan dengan menggunakan mesin pertanian dapat dikeluarkan surat rekomendasi dengan bersurat kepada Direktur Bahan Bakar Minyak melalui aplikasi xstar</p>	<p>Didalam aturan hanya diperuntukan sebatas alat mesin pertanian yang digunakan untuk peternakan semisal mesin chooper, traktor olah lahan yang hanya cukup 5 liter, sehingga tidak mengajukan surat rekomendasi pemberian subsidi BBM</p>
<p>3</p>	<p>Sosialisasi prosedur pemasangan eartag pada hewan ternak</p>	<p>Sudah</p>	<p>Recording dan pendataan ternak</p>		<p>Kurangnya dukungan dari peternak hewan karena menganggap pemasangan eartag dapat melukai hewan ternak.</p>

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, sekiranya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Bidang Kesehatan Hewan dan Bidang Peternakan telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak 100%
2. Masih terdapat rencana tindak lanjut yang belum ditindaklanjuti karena beberapa alasan, yaitu:
 - Perbaikan lantai pada gedung UPTD RPH Wangon belum ditindaklanjuti, karena pada tahun 2024 pemeliharaan gedung dilaksanakan di RPH Cilongok sebagai persiapan di merger dengan RPH Ajibarang. Sehingga perbaikan lantai gedung UPTD RPH Wangon di usulkan pada tahun 2025
 - Perbaikan pintu pada gedung UPTD Puskesmas Banyumas belum ditindaklanjuti, karena anggaran pemeliharaan gedung kantor tahun 2024 diperuntukkan pembangunan ruangan rapat dan ruangan kerja Kepala Dinas. Sehingga perbaikan pintu pada gedung UPTD Puskesmas Banyumas di usulkan pada tahun 2025.

Banyumas, Juli 2024

**Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Banyumas**



Ir. SULISTIONO, M.Si

NIP. 19682802 199403 1 004